

Wapres Ma'ruf Amin Minta Semua Instansi Serius Perangi TPPO

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ma'ruf ingin para pekerja migran terlindungi dari sindikat penempatan ilegal dan TPPO.

"Penyiapan kompetensi ini penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya. Kita menginginkan mereka merdeka dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga dapat hidup lebih sejahtera," kata Ma'ruf Amin, dalam sambutan puncak peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2023, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

HPMI atau Migrants Day, diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Migrants Day kali ini mengangkat tema 'Pekerja Migran Merdeka, Berdaya dan Sejahtera.'

"Saya minta seluruh Instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia," kata Ma'ruf.

Ia meminta semua elemen pemerintah dan negara mensosialisasikan bahaya TPPO. Sehingga, masyarakat Indonesia tidak berangkat bekerja luar negeri secara ilegal.

"Sebarluaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjualbelikan antarmajikan," katanya.

Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan tema pada Migrants Day tahun ini dimaksudkan untuk menggerakkan semangat bersama. Dia menilai Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa. ● mei

Enam Jaksa Teliti Berkas Kasus Pemerasan Firli Bahuri kepada SYL

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sedang meneliti berkas perkara kasus pemerasan terhadap mantan Menteri pertanian (Mentan) Syarul Yasi Limpo (SYL) yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Murdianto, berkas perkara Firli sedang diteliti enam jaksa selama tujuh hari ke depan.

"Bahwa dengan diterimanya berkas perkara pidana ini, maka ada enam jaksa yang akan meneliti dengan tenggang waktu tujuh hari," kata Herlangga dalam keterangannya, Senin (18/12).

"Untuk meneliti dan mempelajari kelengkapan formulir maupun materil," kata Herlangga.

Menurutnya, jika terdapat

kekurangan materi penyidikan dalam kasus ini, maka jaksa akan mengembalikan berkas perkara ke Polda Metro Jaya agar melengkapi kembali.

"Selanjutnya menentukan sikap apakah hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap atau belum," katanya.

Untuk diketahui, polisi telah melimpahkan berkas perkara Firli Bahuri ke Kejati DKI Jakarta pada Jumat (15/12). Polisi sudah memeriksa 104 saksi dan 11 orang ahli dalam perkara ini. Dari 104 orang saksi, polisi telah memeriksa salah satunya SYL, Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Tirta Juana Darmadji atau Alex Tirta, dan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. ● han

ASN Diingat tak Posting hingga Like Foto Kampanye di Medsos

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas selama proses Pemilu 2024.

Jika ASN tidak netral maka pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional.

"Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparial. Jika ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional," ujar Anas dalam keterangannya, Senin (18/12).

Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Tidak profesionalnya ASN saat pesta demokrasi akan menyebabkan target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik.

Di dalam UU No. 20/2023 tentang ASN termaktub bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Netralitas yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik.

"ASN tetap punya hak pilih, namun hanya bisa diberikan di bilik suara, tidak di media atau kanal lain," tegas Anas.

Sebab itu, ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dalam gelaran pesta demokrasi terdapat beberapa area yang sering dilanggar mulai dari ikut serta agenda kampanye, memfasilitasi kegiatan kampanye, sampai dengan penggunaan sosial media yang mendukung peserta pemilu.

"ASN agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam suasana kampanye pemilu saat ini. Kami imbau agar ASN tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial berupa posting, komentar, membagikan tautan, atau memberi ikon like," ujar Anas.

Untuk menjamin terjalannya netralitas ASN, sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB ini ditandatangani bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN, dan Bawaslu. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



HARI PEKERJA MIGRAN INTERNASIONAL

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memberikan keterangan pers saat menghadiri perayaan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) di Jakarta, Senin (18/12). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar perayaan HPMI dengan mengusung tema Pekerja Migran Indonesia Merdeka Berdaya Sejahtera.

MENUJU PEMILU 2024

KPK Siap Tindak Lanjuti Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

KPK tindak lanjuti dugaan adanya transaksi janggal pada dana kampanye salah satu peserta Pemilu 2024, setelah menerima LHA dari PPATK.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan, KPK siap menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait janggalnya dana kampanye salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ghufron menuturkan, KPK bakal menindaklanjuti temuan tersebut apabila transaksi mencurigakan itu diduga berasal dari korupsi.

"PPATK akan mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi, atas hasil LHA (laporan hasil analisis) tersebut, KPK melakukan proses hukum," kata Ghufron kepada wartawan, Senin (18/12).

Namun saat ini KPK belum melakukan pendalaman karena belum menerima LHA

dari PPATK.

"Sejauh ini KPK belum menerima LHA tersebut dari PPATK," ujar Ghufron.

Sementara Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada transaksi janggal yang diduga untuk membiayai kampanye Pemilu 2024 yang bersumber dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya.

Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye (RKDK). Seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan buat keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar.

Ivan mengaku sudah memberikan laporan itu kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) RI juga mengaku telah mendapatkan laporan tersebut.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait laporan PPATK dan menyampaikan hasilnya pada publik pekan depan.

Sementara, Komisioner KPU Idham Holik menyebutkan laporan PPATK juga menyebutkan ada transaksi janggal yang ke luar dan masuk dari rekening bendahara partai politik (parpol). Meski begitu ia tak mengetahui secara detail ke mana aliran uang mencurigakan itu karena laporan PPATK hanya menyampaikan secara general.

Pengajar hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai, aparat penegak hukum mesti menindaklanjuti dugaan transaksi janggal untuk kampanye Pemilu 2024.

Ia meminta agar aparat penegak hukum tidak terpaku dengan Undang-Undang Pemilu untuk memproses kasus tersebut. Menurutnya, Undang-Undang (UU) Tin-

dak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa digunakan karena keterbatasan aturan UU Pemilu yang hanya mengatur aliran dana kampanye pada masa kampanye.

Sementara, aktivitas kampanye sudah dilakukan partai politik jauh sebelum masa kampanye dimulai.

"Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan menggunakan instrumen hukum pemilu, maka prosesnya bisa diupayakan melalui penegakan hukum menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang," kata Titi kepada wartawan, Senin (18/12). ● mei

Janji Cak Imin: Pagi Dilantik (Jadi Wapres), Sore Berantas Pinjol Ilegal dan Judi Online

BEKASI (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, berjanji bakal langsung memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut bakal langsung ditangani usai dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

"Mas Anies dan saya menang, pagi harinya dilantik, sore langsung memberantas semua pinjaman online ilegal," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu di hadapan ibu-ibu Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Gedung Guru, Tambun, Bekasi Selatan, Senin (18/12).

"Judi online ini memang luar biasa, orang diiming-imingi dengan iming-iming palsu," ucap Ketua Umum Partai Kebangsaan (PKB) itu melanjutkan.

Cak Imin berpandangan, masyarakat terjerat pinjaman dan judi online lantaran kondisi hidup yang susah. Rakyat kesulitan mendapatkan modal untuk dapat berusaha.

Di hadapan ratusan ibu-

ibu Majelis Taklim, Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa dirinya sangat mengetahui persis persoalan pinjaman dan judi online.

"Kenapa itu terjadi? karena susah cari kerjaan, susah cari pinjaman, lha wong pinjam bukan untuk gaya-gayaan kok, pinjam untuk bisnis tapi susah," kata Cak Imin.

"Insya Allah Amin (Anies-Muhaimin) menang, negara ini kaya dan kita siapakan pinjaman yang normal, bukan pinjaman penipuan seperti pinjol," kata Cak Imin.

Cak Imin mengatakan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh presiden dan wakil presiden. Ia bersama Anies Baswedan bakal langsung menyelesaikan dua persoalan itu setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. "Kok kelihatannya gampang banget ya? Ya gampang, yang penting niat memimpin dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat," katanya.

"Sekarang ini judi online sama pinjaman online enggak ada yang bisa berantas kecuali presiden dan wakil presiden," ujarnya. ● mei

Gibran Diyakini Bakal Kuasai Panggung Debat Cawapres, Dia Tahu Lapangan

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, optimistis calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bisa menguasai panggung debat cawapres pada Jumat (22/12) mendatang. Sebab, Gibran telah memiliki pengalaman banyak untuk dijadikan bakal pada debat cawapres 2024.

"Intinya Mas Gibran mengetahui lapangan banyak. Dia mengetahui lapangan banyak, saya kira hal-hal yang sifatnya abstrak maupun lapangan, saya kira akan beliau sampaikan," kata Budiman saat ditemui di Kantor Relawan Prabu, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12).

Selain menjabat wali kota Solo selama dua tahun terakhir, Gibran juga dulunya adalah seorang pebisnis. Budiman menambahkan, tema debat cawapres nanti yang lebih banyak membahas masalah ekonomi merupakan "Gibran's thing ..." (Mas Gibran) pengalaman dan sudah berbicara tentang banyak hal," tutur Budiman.

Sebelumnya, Budiman juga angkat bicara soal Gibran

yang selama ini dikenal irit bicara. Budiman meyakini, dalam debat nanti, Gibran akan banyak bicara.

"Yakinlah beliau akan banyak bicara di waktu yang tepat," kata Budiman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan debat kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (22/12). Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus capres, pada debat kedua nantinya akan diikuti khusus cawapres.

Dalam debat, ketiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), Infrastruktur, dan Perkotaan.

Sementara itu, dalam debat pertama yang telah dilaksanakan, para capres membahas soal hukum, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia (HAM), demokrasi, hingga layanan publik. ● han

Mahfud MD Janjikan UU Masyarakat Hukum Adat Jadi Prioritas Prolegnas

JAKARTA (IM) - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD melanjutkan safarinya di hari kedua di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (18/12). Pada kesempatan itu, Mahfud bertemu tokoh lintas agama di Gedung Long See Tong, Perkumpulan Keluarga Lie-Kwee, Jalan Niaga, Kota Padang.

Sejumlah perwakilan masyarakat adat meminta Mahfud mengawal perlindungan hak-hak ulayat dan adat.

Tokoh Mentawai Pdt Firman Simanjuntak juga menyampaikan pesan serupa yakni perlindungan dan pembangunan masyarakat adat.

"Apalagi, sejak Mentawai jadi kabupaten, pembangunan

mandek.

Sedangkan tokoh Nias, Nahdlatul Ulama, dan perwakilan kelompok lainnya menyoal Mahfud MD terpilih sebagai Cawapres agar bisa mengawal dan menjaga kebhinnekaan.

Merespons itu, Mahfud menyatakan berkomitmen untuk mengesahkan UU Masyarakat Hukum Adat.

"Masalah perlindungan terhadap hak adat dan tanah ulayat. Bukan hanya di Padang, Sumbar, tapi di daerah lain banyak. Diambil oleh pemerintah. Kita belum ada peraturan pemerintah tentang hak-hak adat," tutur Menko Polhukam ini.

"Hukum adat itu kan tak tertulis. Tetapi terlukis. Se-

hingga rentan terjadi pencampuran lahan. Kita akan segera merumuskan UU Masyarakat Hukum Adat. Kalau Tuhan menakdirkan, akan jadi prioritas Prolegnas Pemerintah," imbuhnya.

Soal pesan warga Sumbar agar tak melupakan Tanah Minang, Mahfud menyakinkan, dirinya tak akan pernah melupakan tanah ini.

"Jangan khawatir. Sumatera Barat ini seperti rumah kedua. Saya 20 tahun mengajar di Universitas Andalas. Saya juga diberi kehormatan oleh warga Magek, Minangkabau. Kita sama-sama berjuang menyejahterakan Sumatera Barat," pungkask Cawapres yang kerap digelar pendekar hukum ini. ● mei



SERAH TERIMA JABATAN PANGLIMA KOARMADA II

Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto (tengah) bersama Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Dr. Denih Hendrata (kiri) dan Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyon (kanan) melakukan salam komando usai upacara Serah Terima Jabatan Panglima Komando Armada II di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/12). Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin langsung upacara serah terima jabatan Pangkoarmada II dari Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyon kepada Laksamana Muda TNI Dr. Denih Hendrata.

PENGUMUMAN

Memperhatikan ketentuan pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan ini diberitahukan bahwa akan dilakukan penjualan di bawah tangan, berupa:

SHM No. 9551/Pekayonjaya atas nama Bambang Etriadi dengan luas tanah 170 m² yang terletak di Blok/No. Kav. (setempat dikenal dengan Jalan Raya Pekayon No. 2A RT. 003 RW. 01) Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat.

Apabila terdapat pihak yang berminat atau merasa keberatan atau berkepentingan terhadap penjualan di bawah tangan agunan objek tersebut di atas dapat menghubungi:

- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center Jakarta, selaku Pemegang Hak Tanggungan, di alamat Wisma Mandiri 2 Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 83, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Sdr. Bambang Etriadi, selaku Pemberi Hak Tanggungan, di Pondok Surya Mandala Blok B No. 8 RT.014 RW. 013 Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya pengumuman ini

(Bambang Etriadi)